

Signifikansi Organisasi Internasional G-20 Dengan Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi Dan Prabowo

Kentzico Rabil Aldrich*¹, Gusti Wafiq Ukhti Hafa², Rangga Syahputra³, Finsy Aurelia Putri Kinanti⁴

²³⁴¹*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, 12450, Indonesia*

*Corresponding Author: 2110412128@mahasiswa.upnvj.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 January 2024

Revised 30 April 2024

Accepted 2 December 2024

Available online 27 January 2025

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Aldrich, K. R. (2025). Signifikansi Organisasi Internasional G-20 dengan Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Era Jokowi dan Prabowo. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 17(1), 67-76.

ABSTRACT

The role of international organizations in shaping and influencing a country's foreign policy is widely recognized. The G-20, as a leading global economic forum comprising 19 countries and the European Union, has become increasingly important as it serves as a platform for member countries to discuss global economic issues and work together to address complex economic challenges. In the Indonesian context, the G-20 has significant relevance in shaping foreign policy, especially during the leadership of President Joko Widodo and Prabowo Subianto who were elected in 2024 to 2029. Indonesia as one of the G-20 member countries plays an important role in determining foreign policy. It has a strategic position in international relations and has the opportunity to influence the global agenda through its participation in this organization. Therefore, the changing politics and dynamics of international relations during the Joko Widodo and Prabowo administrations will provide an interesting context to explore the relationship between Indonesia and the G-20 in shaping foreign policy. This is due to the different visions and strategies in managing foreign relations, which may also affect Indonesia's interaction with the G-20 in shaping global policy. This research aims to analyze how Indonesia's membership in the G-20 affects the country's diplomatic priorities and strategies, both during Jokowi's administration and under Prabowo Subianto's leadership. This research uses qualitative methods and Foreign Policy Theory to understand the impact and changes in Indonesia's foreign policy related to participation in this major global economic forum.

Keyword: Globalization, International Organizations, G-20, Foreign Policy

ABSTRAK

Peran organisasi internasional dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara telah diakui secara luas. G-20, sebagai forum ekonomi global terkemuka yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, perannya menjadi semakin penting karena berfungsi sebagai platform bagi negara-negara anggota untuk membahas permasalahan perekonomian global dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan perekonomian yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, G-20 memiliki relevansi yang signifikan dalam membentuk kebijakan luar negeri, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang terpilih pada tahun 2024 hingga 2029. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20 memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan luar negeri. Posisi strategis dalam hubungan internasional dan mempunyai peluang untuk mempengaruhi agenda global melalui partisipasinya dalam organisasi ini. Oleh karena itu, perubahan politik dan dinamika hubungan internasional pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo akan memberikan konteks menarik untuk mengeksplorasi hubungan Indonesia dan G-20 dalam membentuk kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi dan strategi dalam mengelola hubungan luar negeri, yang juga dapat mempengaruhi interaksi Indonesia dengan G-20 dalam pembentukan kebijakan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keanggotaan Indonesia di G-20 mempengaruhi prioritas dan strategi diplomatik negara, baik selama masa pemerintahan Jokowi maupun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Politik Luar Negeri untuk memahami dampak dan perubahan dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait partisipasi di forum ekonomi global utama ini.

Keyword: Globalisasi, Organisasi Internasional, G-20, Politik Luar Negeri



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks ini, peran dari organisasi internasional semakin diakui baik dalam membentuk maupun mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu organisasi internasional yang memiliki signifikansi yang besar adalah G-20. Sebagai forum ekonomi terkemuka di dunia yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, peran G-20 menjadi semakin penting karena berperan menjadi platform negara-negara anggota dalam berdiskusi mengenai isu-isu ekonomi global dan kerjasama dalam menanggapi tantangan-tantangan ekonomi yang kompleks.

Melihat konteks Indonesia, G-20 memiliki relevansi yang signifikan dengan pembentukan kebijakan luar negeri terutama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih 2024 sampai 2029. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20 memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional dan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi agenda global melalui partisipasinya dalam organisasi ini. Sehingga perubahan politik dan dinamika hubungan internasional pada era pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo nantinya akan memberikan konteks menarik untuk menjelajahi hubungan antara Indonesia dengan G-20 dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan keduanya memiliki visi dan strategi yang berbeda dalam mengelola hubungan luar negeri yang memungkinkan juga mempengaruhi bagaimana Indonesia berinteraksi dengan G-20 dalam pembentukan kebijakan global.

Menurut Stiftung, (2011), terdapat dua hal dasar yang menjadi tujuan Indonesia dalam forum G-20, yaitu keinginan meningkatkan standar mutu dari komoditas berdasarkan tuntutan dari pasar Internasional dan membuat Indonesia dapat bersaing dengan pasar global. Sehingga hal ini menjadi aspek pendorong G-20 dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dikenal dengan pemerintahan inward looking policy yaitu strategi pembangunan yang lebih menekankan pada domestik pengganti barang impor. Dalam hal ini pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap mempertahankan hubungan dan berkomitmen dalam beragam kerjasama multilateral termasuk G20.

Konsep bebas aktif kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sebuah landasan penting. Bebas aktif menegaskan bahwa Indonesia akan aktif dalam diplomasi Internasional tanpa terikat pada kepentingan suatu negara manapun. Pada era kepemimpinan Joko Widodo komitmen tersebut tercerminkan kuat pada fokus kerjasama regional dan global Indonesia yang berkeadilan dan saling menguntungkan. Melalui keanggotaannya dalam G20, Indonesia telah memperjuangkan representasi negara berkembang-menuju negara maju dengan mempromosikan kepentingan global yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori liberal dalam hubungan internasional yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dan peran aktif negara-negara dengan memperjuangkan kepentingan bersama.

Dalam konteks teori liberal menurut Immanuel Kant, dimana perdamaian dapat tercipta melalui kerjasama antar negara-negara yang memiliki tujuan sama dan bekerja sama serta tidak memiliki alasan untuk berperang satu sama lain. Partisipasi Indonesia dalam G20 menunjukkan signifikansi forum tersebut dalam mempromosikan kerjasama internasional dan membentuk tatanan global yang lebih inklusif. Terdiri dari 20 negara anggota dengan tujuan untuk membahas isu-isu ekonomi global, forum ini memberikan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan dari negara berkembang termasuk masalah pembangunan, ketimpangan ekonomi dan isu lingkungan. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam G20 pada era Jokowi mencerminkan upaya negara ini untuk menjadi pemain aktif dalam pembentukan tatanan global yang lebih demokratis dan berkeadilan. Dalam hal ini, teori Liberal memberikan pemahaman yang relevan tentang bagaimana keikutsertaan Indonesia di G20 tidak hanya bermanfaat bagi negara itu sendiri, namun juga bagi stabilitas dan kesejahteraan global secara keseluruhan.

Tujuan

Artikel ini menggarisbawahi pentingnya peran G-20 dalam membentuk dinamika kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan dua tokoh sentral, Jokowi dan Prabowo. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis bagaimana keanggotaan Indonesia di G-20 akan berdampak pada prioritas dan strategi diplomatik negara, mengingat bahwa forum ini merupakan platform utama bagi negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia untuk membahas isu-isu global. Dengan latar belakang perubahan geopolitik dan ekonomi yang cepat, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya di G-20 untuk memperkuat pengaruh internasional dan mencapai tujuan nasional. Pendekatan komparatif antara era Jokowi dan Prabowo memberikan pandangan kritis mengenai kontinuitas dan perubahan dalam kebijakan luar negeri, serta bagaimana dinamika politik domestik mempengaruhi peran Indonesia di kancah global.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia selama periode kepemimpinan Jokowi serta analisis kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam konteks partisipasi Indonesia di G-20. Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi dokumen-dokumen resmi, arsip berita, publikasi pemerintah, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, di mana peneliti mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis data dari publikasi yang ada untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh dua kepemimpinan tersebut.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis konten, di mana narasi dan teks dalam dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis untuk memahami pergeseran, kontinuitas, serta fokus kebijakan luar negeri yang diambil. Khususnya, akan diperhatikan bagaimana setiap pemimpin menanggapi dan mengutilisasi forum G-20 sebagai platform untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah internasional. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang terkait dengan isu global dan regional dalam konteks forum ekonomi dunia tersebut.

Teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Untuk menggambarkan latar belakang permasalahan serta menjawab inti dari masalah tersebut, penulis menerapkan Teori Politik Luar Negeri sebagai landasan analisis. Teori ini digunakan untuk menilai bagaimana keanggotaan Indonesia di G-20 akan mempengaruhi prioritas dan strategi diplomatik negara tersebut, mengingat bahwa forum ini adalah platform utama bagi negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia dalam membahas isu-isu global. Menurut teori yang dikemukakan oleh Richard Snyder dalam model pengambilan keputusan politik luar negeri, negara mengeluarkan perilaku tertentu dalam konteks hubungan internasional. Saat negara membuat keputusan, berbagai faktor dari dalam negeri dan luar negeri mempengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor ini mencakup struktur domestik negara serta dinamika internasional, yang keduanya memainkan peran penting dalam membentuk preferensi kebijakan luar negeri negara. Komponen internal lebih menitikberatkan pada hubungan masyarakat dalam negara, sementara komponen eksternal lebih terfokus pada dinamika internasional seperti hubungan bilateral dan kondisi global (Snyder, 1962, p. 203).

Keputusan yang diambil, baik secara individu maupun kolektif dalam konteks lembaga atau organisasi, bersifat proyektif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan luar. Faktor internal mencakup kondisi domestik seperti lokasi geografis, kekuatan nasional, dinamika politik internal, serta pandangan dan sikap publik yang memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan negara. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup dinamika hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral antarnegara serta intervensi dari organisasi internasional. Organisasi internasional dapat memberikan tekanan pada negara-negara untuk mengadopsi kebijakan tertentu dengan menerapkan standar dan regulasi yang mereka tetapkan guna mencapai tujuan organisasi tersebut.

Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri sangat kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor dari dalam dan luar negeri yang mempengaruhi keputusan para pemimpin. Kebijakan luar negeri mencakup interaksi antarnegara dalam politik, ekonomi, sosial, dan militer untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Negara terlibat dalam berbagai bentuk kerjasama seperti bilateral, trilateral, regional, dan multilateral, dengan menerapkan kebijakan yang mencakup tindakan militer, diplomasi, atau kerjasama ekonomi, semuanya didasarkan pada pertimbangan faktor internal dan eksternal untuk menanggapi kondisi global yang ada.

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan keputusan politik yang selalu didasarkan pada kepentingan nasional. Faktor internal, seperti dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi, sangat mempengaruhi pembuatan keputusan ini. Di sisi lain, faktor eksternal juga memainkan peran penting. Sebagai contoh, dalam konteks keanggotaan Indonesia di G-20, organisasi ini

memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan kebijakan luar negeri, terutama pada masa pemerintahan Jokowi dan Prabowo. Ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri memiliki peran krusial dalam mengarahkan tindakan negara secara efektif guna mencapai tujuan nasional yang diinginkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Era Jokowi

Joko Widodo lahir di Rumah Sakit Brayat Minulyo pada tanggal 21 Juni 1961, dan sejak saat itu tinggal di sebuah rumah kontrakan di tepi sungai di Solo bersama keluarganya. Cara hidup mereka benar-benar tidak mudah. Ayah Jokowi harus memindahkan istri dan anak-anaknya dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya karena dia adalah seorang penjual kayu dan harus menghidupi keluarganya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, keluarga Joko Widodo masih harus setuju untuk pindah ke rumah seorang kerabat di daerah Gondang setelah dipaksa meninggalkan rumah mereka di tepi Sungai Pepe oleh Pemerintah Kota Solo. Dengan sejarah yang penuh tantangan sebagai pengusaha di tepi sungai, ia dan beberapa mitra bisnis lainnya meluncurkan pembentukan Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia, atau Asmino, sebuah asosiasi nasional untuk pengusaha mebel untuk cabang Solo. Jokowi diundang untuk memimpin kelompok tersebut dan memelopori sejumlah inisiatif yang meningkatkan stabilitas keuangan para pemilik perusahaan kecil. Setelah dua tahun kepemimpinan Jokowi di Asmino, para pengurus dan anggota asosiasi bisnis ini mulai mendiskusikan pencalonan Joko Widodo dalam pemilihan kepala daerah di Solo pada tahun 2005. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta pada bulan Maret 2012. Mereka meraih 42,60% dari total suara. Pasangan calon yang menang, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli, dikalahkan pada putaran kedua pemungutan suara oleh Jokowi dan Basuki. Jokowi ditugaskan oleh partainya untuk melanjutkan karir politiknya sebagai calon Presiden Republik Indonesia, setelah beberapa tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia berlangsung pada tahun 2014 (Arnesia, 2022).

Dilihat dari latar belakang Jokowi, dapat dianalisis bagaimana cara Jokowi untuk melakukan *problem solving* pada sebuah isu atau polemik yang menyangkut nama Indonesia, dan juga cara Jokowi untuk membentuk sebuah kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kabinetnya pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa Jokowi mengerti hal-hal yang terkait dengan masyarakat golongan menengah ke bawah dan tidak hanya memperhatikan orang-orang menengah ke atas dikarenakan Jokowi pernah hidup dengan keadaan seperti itu. Hal tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri sebuah negara di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. "*Down to Earth Diplomacy*" menjadi konsep yang menjadi pedoman ketika pemerintah memprioritaskan diplomasi ekonomi. Gagasan ini menekankan bahwa Indonesia harus secara langsung memberikan manfaat bagi warganya melalui kebijakan luar negerinya, yang benar-benar berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi bangsa (Mahadana, 2023).

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri adalah hasil dari pengambilan keputusan politik yang didasarkan pada berbagai faktor. Kepentingan nasional suatu negara diperhitungkan saat menyusun kebijakan luar negerinya. Tidak diragukan lagi, Indonesia menggunakan kebijakan luar negerinya yang bebas dan aktif sebagai taktik politik dalam urusan internasional. Setiap pemerintahan harus memberikan landasan operasional agar konsep bebas aktif ini dapat dioperasionalkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Tujuan nasional negara yang bersangkutan merupakan bagian integral dari penciptaan kebijakan luar negeri negara tersebut (Santoso et al., 2023).

Kebijakan luar negeri Indonesia terus dimodifikasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan temperamen para pemimpin negara. Kebijakan luar negeri Indonesia dicirikan oleh pandangan ke dalam (*inward-looking*) di bawah pemerintahan Jokowi. Karakter *inward-looking* adalah taktik yang digunakan oleh suatu negara untuk membentengi diri secara internal sebelum akhirnya bergabung dengan arena politik global. Karakter ini digunakan untuk mendukung inisiatif pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan fokus Jokowi pada tujuan untuk memperkuat infrastruktur internal negara untuk memaksimalkan potensinya sebagai alat untuk persaingan kebijakan luar negeri (Wargi, 2021).

Kebijakan luar negeri Jokowi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Jokowi adalah seperti penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, mempertahankan stabilitas nasional, isu politik identitas, dan pemerataan infrastruktur atau pembangunan. Namun jika kita berbicara terkait faktor internasional, maka kebijakan luar negeri Jokowi dipengaruhi oleh kebangkitan Cina

dan wacana indo-pasifik, pandemi Covid-19, revolusi teknologi 4.0, dan multipolarisme seperti Rusia, Cina, UE, IORA, BRICS, dan MIKTA.

Pemerintahan Jokowi telah meluncurkan narasi kebijakan luar negeri yang unik dengan latar belakang sejarah ini. Narasi ini memberikan penekanan yang signifikan pada peran pembangunan ekonomi dalam mendorong interaksi diplomatik. Penekanan ini paling baik dicontohkan oleh rencana "Poros Maritim" andalan Jokowi, yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia yang sangat besar untuk ekspansi ekonomi (Kristiyanti & Fauziningrum, 2022). Dengan membangun tol laut sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, Doktrin Poros Maritim bertujuan untuk meningkatkan pentingnya ekonomi maritim dan mendorong pembangunan kelautan nasional. Tol laut merupakan upaya untuk membangun konektivitas maritim yang efisien melalui kapal-kapal yang berlayar dari wilayah barat ke timur Indonesia secara teratur dan terjadwal (Syahrin, 2018). Dedikasi ini ditunjukkan oleh program "Poros Maritim" Jokowi, yang bertujuan untuk memanfaatkan karakter kepulauan Indonesia secara penuh untuk keuntungan ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur kelautan, jalur laut, dan dorongan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, program ini berupaya meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim (Rachman, 2022).

G-20 dan Signifikansinya Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Group of Twenty (G20) adalah sebuah platform penting untuk kerja sama ekonomi global yang terdiri dari 19 negara anggota dan satu institusi Uni Eropa. Indonesia bergabung dengan G20 pada tahun 1999 dan menjadi anggota resmi. Sebagai anggota G20, Indonesia kini menjadi pemain penting dalam ekonomi global, yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Secara resmi, Indonesia menjabat sebagai presidensi G20 selama satu tahun penuh, dimulai pada 1 Desember 2021, dan akan berakhir pada KTT G20 di Bali pada November 2022. Sebelum pertemuan G20 di Roma pada 31 Oktober 2021, Indonesia menerima keketuaan langsung dari Italia. Sesuai dengan semangat untuk pulih bersama, Indonesia memimpin Presidensi G20 dengan tema "Recover Together, Recover Stronger". Indonesia mengangkat pandemi COVID-19 yang masih menjadi perhatian utama dunia untuk menekankan perlunya upaya bersama dan inklusif dalam mengidentifikasi jalur atau solusi untuk pemulihan global (Ikhsan & Dwitanahda, 2023).

Tata kelola organisasi atau kelembagaan, menurut institusionalisme liberal, adalah kumpulan tugas yang dapat dan harus dilakukan melintasi batas-batas negara dengan menggunakan campuran aktor dan non-aktor yang berspesialisasi dalam tugas yang berbeda sesuai dengan keahlian masing-masing. Hasilnya, organisasi ini akan menumbuhkan ketahanan kolektif negara-negara anggota dalam memperoleh pengetahuan dan kekuasaan (Ramli & Idris, 2022). Secara keseluruhan, paradigma institusionalisme liberal telah membentuk kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Jokowi, terutama dalam kaitannya dengan keanggotaan Indonesia di G-20. Sebagai kekuatan pendorong di balik ASEAN dan suara kawasan secara keseluruhan, Indonesia bertujuan untuk memperluas pengaruhnya secara global, memperkuat kepemimpinannya di kawasan, dan mendukung kolaborasi regional dan internasional untuk mendorong kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia memimpin G20 pada tahun 2022 dan, dengan mendorong pertumbuhan beberapa industri utama, memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah berupaya memperkuat posisi internasionalnya dengan menerapkan diplomasi kekuatan menengah (*middle power diplomacy*), yang secara sengaja menampilkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan global dengan mengutamakan hal-hal yang secara langsung berdampak pada negara dan bangsa Indonesia.

Untuk memastikan bahwa ekonomi global tetap terbuka, adil, dan saling menguntungkan serta tidak ada yang tertinggal, terutama kelompok miskin dan rentan, Indonesia berfokus pada penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global yang efektif dengan menerapkan prinsip bebas aktif selama masa kepresidenan G20 pada tahun 2022. Indonesia juga bercita-cita untuk memiliki sikap inklusif dalam urusan dunia. Di antara anggota G20 dan pemangku kepentingan lainnya, seperti negara-negara non-G20, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, Indonesia telah mendorong komunikasi dan kolaborasi (Azmi & Bintang, 2024).

Setidaknya ada dua faktor yang membuat partisipasi Indonesia dalam konferensi G20 menjadi signifikan. Pertama, sebagai negara yang ingin memenuhi ekspektasi konsumen global akan kualitas produk, Indonesia terlibat dalam forum ini. Pada kesempatan ini, Indonesia mendapat kesempatan untuk menerima masukan mengenai barang-barang ekspornya. Kedua, Indonesia diuntungkan dengan keterbukaan dalam hal kerja sama, transfer teknologi, dan prospek pasar yang besar. Partisipasi Indonesia dalam KTT G20 akan menjadi sangat penting karena Indonesia secara tradisional telah menjadi pemain kunci dalam menjaga

stabilitas regional. Selain itu, partisipasi Indonesia juga diperkuat oleh keinginan untuk memiliki posisi negosiasi yang kuat, karena keputusan-keputusan yang diambil di forum global pasti akan berdampak, terutama pada negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia dapat dianggap sebagai perwakilan negara berkembang dalam forum global yang membahas topik-topik terkait seperti perselisihan perdagangan di WTO, masalah keuangan di IMF, dan hal-hal lainnya (Astuti & Fathun, 2020).

Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20, Indonesia memiliki kesempatan khusus untuk memperkuat peran kepemimpinannya dan berperan sebagai juru bicara bagi kepentingan dan pandangan semua negara ASEAN. Indonesia kini dapat bergerak lebih cepat menuju pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, keuangan inklusif, mobilisasi sumber daya dalam negeri, ketahanan pangan dan gizi, pengembangan sumber daya manusia, dan bisnis inklusif, berkat keanggotaannya di G20. Selain itu, dengan bekerja sama di dalam G20 untuk meningkatkan nilai ekspor, meningkatkan kontribusi perdagangan dan investasi terhadap pertumbuhan global, serta memperkuat sistem perdagangan multilateral, Indonesia dapat lebih memperluas keberhasilan ekonominya di sektor perdagangan dan investasi. Di bidang ketenagakerjaan, keanggotaan Indonesia di G20 menawarkan peluang untuk melacak penyerapan tenaga kerja, mempromosikan keterlibatan kaum muda, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan keterampilan. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam G20 dapat dimanfaatkan untuk bertukar praktik terbaik dalam menangani transformasi digital, mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mempercepat perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah (Riwanto et al., 2023).

Indonesia dianggap sebagai negara demokratis di forum-forum internasional seperti G-20, yang membuatnya lebih mudah untuk mempromosikan citra Indonesia dan meningkatkan kepercayaan diri Indonesia di mata investor asing. Prospek yang lebih baik untuk ekonomi Indonesia dikaitkan dengan peningkatan investasi asing. Menjadi anggota G-20 juga memberi Indonesia kesempatan untuk melihat lebih dekat bagaimana negara-negara industri merumuskan kebijakan dan, jika sesuai, menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut ke Indonesia. G-20 dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai platform paling penting untuk menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam strategi diplomasi Indonesia: sejak tahun 1967, Indonesia secara aktif mempromosikan ASEAN sebagai wadah diplomasi utama. Sejalan dengan pandangannya yang terus memandang ASEAN sebagai mitra utamanya, Indonesia kini menambahkan G-20 sebagai platform penting lainnya untuk memajukan tujuan nasionalnya.

Orientasi Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Prabowo

Track record Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden RI selalu kurang moncer karena pandangan masyarakat terhadapnya telah terpengaruh oleh masa lalunya yang kontroversial. Ketika nama Prabowo Subianto disebut, masyarakat cenderung mengingat kontroversi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di masa lalunya. Hal ini telah menjadi beban politik yang terus mengikuti karir politiknya, mengurangi daya tariknya di mata pemilih yang mempertimbangkan rekam jejak moral para kandidat (Rizky, Harris & Soekarno, 2023).

Namun pada kenyataannya, Prabowo sukses memenangkan Pilpres 2024 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024. Pengumuman ini didasarkan pada Berita Acara KPU Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Proses pengumuman tersebut berlangsung setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi suara nasional dan rapat pleno, yang menetapkan bahwa Prabowo-Gibran memperoleh 58,6 persen dari total suara sah, dengan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 suara, unggul atas lawan-lawannya.

Disamping itu, dunia mulai menyoroti arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan pemerintahan baru. Dikutip dari Kompas id, (21/02/2034), mengatakan bahwa salah satu fokus utamanya adalah bagaimana Indonesia mengimplementasikan prinsip non blok dengan aktif, bermutu, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam kawasan. Sebagai negara besar dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, langkah-langkah Indonesia dalam politik luar negeri tidak hanya berdampak pada stabilitas regional tetapi juga mempengaruhi dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia saat ini menjadi penting, terutama dalam konteks bagaimana negara ini memanfaatkan prinsip non blok untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan keadilan di tingkat internasional maupun regional.

Sistem politik dan kerangka kerja institusional Indonesia dipandang berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia, menurut paradigma institusionalisme liberal yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dalam sebuah pemerintahan di mana presiden memiliki kekuasaan yang besar, pandangan realis dan nasionalis Prabowo, serta kepribadiannya, seharusnya memiliki dampak besar pada bagaimana kebijakan luar negeri ditangani. Perkiraan di masa depan menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi lebih terlibat dalam

geopolitik internasional, dengan penekanan yang lebih besar pada keamanan dan kepentingan nasional, dan melalui partisipasi dalam forum-forum internasional seperti G-20. Selain itu, untuk meningkatkan posisi ekonomi Indonesia di dunia internasional, Indonesia diharapkan untuk terus menerapkan kebijakan ekonomi yang stabil sambil meningkatkan diplomasi ekonomi dan kolaborasi internasional.

Selain itu, menurut pendapat Guru Besar Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu, menyatakan bahwa kemungkinan besar, pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran akan melanjutkan pendekatan pragmatis yang telah diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini menandakan kesinambungan dalam kebijakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang praktis dan efektif, tanpa terlalu terikat pada ideologi tertentu. Dalam konteks ini, pragmatisme dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi aktual, serta mengambil langkah-langkah yang dianggap paling efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran mungkin akan mengadopsi pendekatan yang sama, dengan fokus pada pencapaian hasil yang nyata dan solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara.

Pertanyaan spesifik lain juga dilontarkan terkait bagaimana Prabowo akan mengarahkan kebijakan luar negeri, terutama dalam hubungannya dengan China. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, beberapa analis mengungkapkan dengan retorika nasionalis yang kuat dan pengalaman militer masa lalunya, mungkin cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih tegas terhadap Beijing. Ini bisa diinterpretasikan sebagai antisipasi terhadap potensi kebijakan luar negeri yang lebih proaktif atau bahkan konfrontasional terhadap China.

Pada diskusi bulan November di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Prabowo menegaskan komitmennya kepada audiens Indonesia untuk "mempertahankan kebijakan luar negeri independen". Dengan jelas, ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terikat oleh aliansi militer atau keterlibatan geopolitik tertentu, sambil tetap menjaga hubungan yang baik dengan semua tetangga negaranya. Ini menunjukkan kesadaran Prabowo akan pentingnya menjaga kemandirian dan netralitas dalam urusan luar negeri, sambil memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam lingkup kerja sama yang luas dan inklusif.

Pada pemerintahan baru, Prabowo akan dihadapkan pada isu yang kompleks terkait Laut China Selatan, di mana klaim dominan Beijing atas wilayah tersebut menimbulkan ketegangan dengan anggota ASEAN. Namun, Prabowo telah menegaskan bahwa pendekatan yang diutamakan adalah melalui diplomasi. Dalam suatu pernyataan setelah pertemuan antara menteri pertahanan ASEAN-China pada tahun 2021, Prabowo menekankan pentingnya dialog dan konsultasi yang didasarkan pada saling percaya untuk menyelesaikan sengketa di perairan yang kaya sumber daya tersebut. Selain itu, ia juga mendukung negosiasi lebih lanjut mengenai Panduan Perilaku di Laut China Selatan, yang bertujuan untuk menetapkan klaim wilayah dan hak di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, Prabowo menunjukkan komitmen untuk mempromosikan penyelesaian damai dan berbasis aturan terhadap ketegangan di Laut China Selatan.

Seperti dikutip Kompas TV, (17/02/2024), mengatakan ketika topik Laut China Selatan muncul dalam debat presiden pada bulan Januari, Prabowo menyoroti urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritimnya. Fokusnya terletak pada perlunya Indonesia untuk mampu membela diri di Laut Natuna Utara. Melalui pembicaraannya, Prabowo menggarisbawahi pentingnya memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Sikapnya yang menekankan peningkatan pertahanan maritim mencerminkan kemungkinan bahwa Prabowo mungkin akan menjadi lebih tegas dalam menegakkan kedaulatan Indonesia di bagian tersebut dari lautan.

Mengutip *The Diplomat*, (07/03/2024), mengatakan Prabowo, dalam upayanya untuk meyakinkan publik bahwa dia adalah pewaris yang layak bagi Presiden Joko Widodo, mungkin akan membawa Indonesia ke arah kebijakan luar negeri yang lebih berfokus pada keamanan. Tidak diragukan lagi, pernyataan publik yang telah dia buat menunjukkan bahwa dia berpotensi meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan dan mengubah kebijakan perdagangan dan ekonomi sesuai dengan pandangan keamanan nasionalnya. Sifat nasionalis dan gaya retorika yang berapi-api dapat membuat para diplomat yang terbiasa dengan pendekatan sederhana Jokowi merasa cemas. Namun, hingga saat ini, gambaran yang jelas tentang isi retorika Prabowo masih kabur bagi kebanyakan orang.

Dalam konteks perdagangan, Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan ekonomi yang digagas oleh Jokowi, terutama dalam hal hilirisasi. Pendekatan ini melibatkan kombinasi larangan ekspor dan insentif domestik untuk mendorong perusahaan asing agar memproses bahan mentah di dalam negeri. Kebijakan terkait dengan nikel, khususnya, telah menjadi salah satu kebijakan geoekonomi utama Indonesia. Investasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan China telah memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dan mendorong perkembangan industri baru yang kuat di Indonesia.

Signifikansi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Prabowo dengan G-20

Keikutsertaan Indonesia dalam G-20 tidak hanya merupakan sebuah kehormatan, tetapi juga sebuah kesempatan yang berharga untuk memperluas jaringan diplomatiknya dengan negara-negara besar dan berpengaruh di dunia. Mengutip *Indonesia Defense Magazine*, (9/11/2022), Partisipasi Prabowo sebagai perwakilan Indonesia dalam Forum Keamanan Pangan Global di KTT G20 menandai perhatian yang mendalam terhadap isu-isu strategis di tingkat global. Dalam konteks ini, perannya pasti akan mendapat perhatian khusus, mengingat pentingnya keamanan pangan sebagai aspek krusial dalam kebijakan luar negeri. Kehadirannya tidak hanya sebagai representasi Indonesia tetapi juga sebagai momentum untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan dan pertahanan, terutama di bidang pangan. Dengan demikian, kemungkinan akan bisa menjadi titik tolak bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang fokus pada keamanan dan pertahanan di era kepemimpinan Prabowo.

Sebagai anggota G20, Indonesia memegang tanggung jawab dalam menyumbangkan pandangan dan kebijakan terkait berbagai isu global, termasuk keamanan pangan. Dengan kehadiran Prabowo sebagai perwakilan Indonesia, partisipasi negara ini dalam KTT G20 menjadi lebih dari sekadar keikutsertaan rutin. Ini menjadi momen penting di mana Indonesia dapat memastikan bahwa kepentingannya diwakili secara efektif dan suara negaranya didengar dalam forum internasional yang sangat berpengaruh ini. Prabowo, sebagai perwakilan Indonesia, memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan penting yang mencerminkan situasi dan kebutuhan Indonesia dalam konteks keamanan pangan global. Melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan negosiasi, Indonesia dapat memainkan peran yang konstruktif dalam membentuk kebijakan global yang memperhitungkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, peran Prabowo dan partisipasi Indonesia dalam KTT G20 menjadi krusial untuk memastikan bahwa suara dan perspektif negara ini diakui dan dipertimbangkan dalam upaya bersama menuju solusi yang efektif dan berkelanjutan terkait keamanan pangan global.

Keterlibatan Prabowo dalam pembahasan keamanan pangan global di KTT G20 bukan sekadar partisipasi biasa, melainkan merupakan tonggak penting yang dapat membentuk pijakan bagi kebijakan luar negeri Indonesia di masa yang akan datang. Dengan fokus yang ditekankan pada keamanan dan pertahanan, tampaknya akan menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Ini mencerminkan tekad Indonesia untuk aktif berperan dalam isu-isu keamanan global, serta menegaskan komitmen untuk menekankan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

4. Kesimpulan

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi mencerminkan pendekatan yang unik dan berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional. Mengambil latar belakang Jokowi yang memiliki pengalaman langsung dengan kehidupan menengah ke bawah, kebijakannya menekankan pentingnya diplomasi ekonomi yang memprioritaskan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan konsep "Down to Earth Diplomacy" dan "Poros Maritim," Jokowi menargetkan pemanfaatan sumber daya maritim Indonesia untuk memperkuat posisi negara dalam kancah global, sekaligus memperhatikan stabilitas dan pembangunan sosial-ekonomi di dalam negeri. Faktor domestik seperti demokratisasi, pemberantasan korupsi, dan pembangunan infrastruktur juga memainkan peranan penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sejalan dengan pengaruh faktor internasional seperti geopolitik regional dan global yang berubah-ubah.

Keanggotaan Indonesia di G20 telah memperkuat posisi negara ini dalam arena internasional, tidak hanya sebagai pemain ekonomi global yang penting tetapi juga sebagai negara yang berperan dalam diplomasi dan negosiasi internasional. Melalui partisipasinya di G20, Indonesia berhasil memanfaatkan platform ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat sistem perdagangan multilateral, dan mempromosikan kepentingan ASEAN. Sebagai satu-satunya negara ASEAN di G20, Indonesia juga memperoleh kesempatan untuk memainkan peran kepemimpinan yang lebih besar dan mempengaruhi keputusan yang berdampak luas bagi negara berkembang. Dengan keikutsertaannya yang aktif, Indonesia tidak hanya meningkatkan reputasi dan pengaruhnya di panggung global tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Era pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi akan melanjutkan pendekatan pragmatis yang telah diperkenalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Meskipun Indonesia dapat diharapkan untuk mempertahankan kebijakan luar negeri independen dan prinsip non blok, pendekatan yang lebih tegas terhadap China mungkin menjadi kenyataan dengan retorika nasionalis yang kuat. Namun demikian, Prabowo menekankan pentingnya

dialog dan diplomasi dalam menangani sengketa, khususnya di Laut China Selatan, sementara juga menekankan pentingnya memperkuat pertahanan maritim untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dalam hal ekonomi, komitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi dapat menjadi fokus utama, dengan investasi China menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan ekonomi Indonesia. Meskipun retorika Prabowo menunjukkan potensi peningkatan pengeluaran untuk pertahanan, gambaran yang jelas tentang arah kebijakan luar negeri dan ekonomi masih terus berkembang.

Keikutsertaan Indonesia dalam G-20 di bawah pemerintahan Prabowo tidak hanya menjadi sebuah kehormatan, tetapi juga kesempatan strategis untuk memperluas pengaruh dan mengartikulasikan kepentingan nasional dalam forum internasional yang berpengaruh. Dengan perwakilan Prabowo dalam Forum Keamanan Pangan Global di KTT G20, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap isu-isu strategis di tingkat global, terutama dalam konteks keamanan pangan. Keikutsertaan ini bukan hanya sekedar representasi, tetapi juga momentum untuk menegaskan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan pertahanan, khususnya di bidang pangan. Melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan negosiasi di KTT G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang konstruktif dalam membentuk kebijakan global yang memperhitungkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan. Dengan fokus yang ditekankan pada keamanan dan pertahanan, tampaknya kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo akan menempatkan prioritas pada upaya bersama untuk mengatasi tantangan global, sekaligus menegaskan komitmen terhadap kepentingan nasional.

Daftar Pustaka

- Anwar, L. A. (2024, February 21). *Perkiraan Arah Politik Luar Negeri Indonesia di Era Pemerintahan Prabowo*. Kompas.id.
- Arnesia. (2022, June). Analisis Gaya Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (Ir.H.Joko Widodo). *Jurnal UMY*.
- Astuti, & Fathun. (2020, November). Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47–68. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Azmi, & Bintang. (2024, April). PRINSIP BEBAS-AKTIF INDONESIA PADA PRESIDENSI G20 TAHUN 2022. *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences*, 3(1), 41–50.
- Bimo, E. S. (2024, February 17). *Bagaimana Kebijakan Luar Negeri RI tentang China dan Asia Pasifik di Era Prabowo? Ini Analisis Pakar*. Kompas TV.
- Gin. (2022, November 9). *Bahas Isu Kelaparan, Menhan Prabowo akan Bicara di Forum Keamanan Pangan Global KTT G20*. Indonesiadefense.com.
- Hermawan, Sriyuliani, Hardjowijono, & Tanaga. (2011, May). *Proyek Riset G20: Peran Indonesia dalam G20: Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia* (1st ed.). Friedrich Ebert Stiftung.
- Riwanto, Perwita, Pangemanan, Sahdan, Agustino, Muradi, Muryantini, Jati, Kenawas, Wahyu, & Angretnowati. (2023, March). *25 Tahun Demokrasi Indonesia* (1st ed.). Tubagus Lima Korporat.
- Kristiyanti, & Fauziningrum. (2022, March). MANAGING INDONESIA TO BECOME THE WORLD MARITIME AXIS. *Jurnal Saintek Maritim*, 22(2), 111–116.
- Mahadana. (2023, December). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi: Perkembangan, Prioritas, Dan Tantangan. *Advances in Social Humanities Research*, 1(10), 2045–2058.
- Rachman. (2022). Geopolitics: Dynamics And Development Of Indonesia's Maritime Axis. *Jurnal Ekonomi*, 11(3), 1102–1108.
- Ramli, M., & Idris, H. (2022). Teori Liberal Institutionalisme dan Pendekatannya dalam Kerjasama Keselamatan Serantau Asean melalui Regionalisme. *Akademika*, 92(1), 73-86.
- Rizky, A. T. J., Harris, E. A., & Soekarno, Z. P. (2023). Analisis Komunikasi Politik Prabowo Subianto Di Media Sosial Menjelang Kontestasi Pemilihan Presiden 2024. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2, 673-680.
- Rachman, J. (2024, March 07). *What Prabowo's Victory Means For Indonesian Foreign Policy*. The Diplomat.
- Sushanti, S. (2019). Indonesia dalam G20: Peluang atau Tren. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(1).
- Santoso, Futeri, Wulansari, Dwi, & Muthmainnah. (2023, June). Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Untuk Perdamaian Dunia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(2), 354–359.

- Syahrin. (2018, June). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1–17.
- Wargi. (2021, August). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi Dalam Upaya Untuk Menguasai Pasar Halal Dunia. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 320–341.